

Konsekuensi Tekad Anggaran Pendidikan 20 Persen

OLEH

**AUGUSTINUS
SIMANJUNTAK**

Doktor ilmu hukum
lulusan Unair



Konsekuensinya, seluruh lembaga pendidikan harus memperhatikan visi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan perlu dikelola dengan memperhatikan kepentingan publik, bukan berkarakter komersial (*profit oriented*)

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, anggaran pendidikan akan mencapai 20 persen dari total belanja negara 2009 sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945. Realisasi itu diungkapkan dalam pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan (RAPBN 2009) di DPR (15/8).

Seolah tidak mau kalah, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono pun menyatakan tekad serupa. Menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, Wali Kota Surabaya Bambang D.H. telah menjanjikan APBD pemerintah kota (pemkot) juga siap memberi porsi yang besar (20 persen) untuk anggaran pendidikan (*Jawa Pos*, 18/8).

Realisasi anggaran itu tentu diharapkan bisa membawa konsekuensi positif terhadap penguatan peran negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam sistem pengelolaan pendidikan. Penggunaan 20 persen APBN/APBD itu bisa memperkuat peran negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Karakter Pengelolaan Pendidikan

Filsuf Plato (427-347) pernah berpendapat bahwa negara bertanggung jawab pada dunia pendidikan, mengingat pendidikan bertujuan mewujudkan kepentingan negara. Di negara kita, tanggung jawab itu telah dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (visi pendidikan nasional).

Konsekuensinya, seluruh lembaga pendidikan harus memperhatikan visi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan perlu dikelola dengan memperhatikan kepentingan publik, bukan berkarakter komersial (*profit oriented*). Namun, pengelolaan pendidikan mulai cenderung berkarakter komersial di saat peran negara mulai menurun. Lembaga pendidikan yang dulu sistem pengelolannya murni sebagai kegiatan publik (nonprofit) akhirnya mulai bergeser ke arah pendidikan berbasis komersial.

Ada beberapa ciri. *Pertama*, pendidikan lebih menekankan pada hasil yang cepat (pragmatisme pendidikan) daripada penanaman aksiologi kehidupan yang terintegrasi dengan sains dan teknologi. Fenomena percepatan kelulusan pun mulai bermunculan (seperti adanya kelas akselerasi dan sistem semester pendek) karena orientasi pendidikan lebih diarahkan pada kemampuan intelektualitas, bukan pada pembentukan karakter (*character building*).

Kedua, peserta didik dipandang sebagai *customer* yang harus diladeni pendidik dengan relasi berkarakter bisnis (transaksional). Tenaga pendidik cenderung dipandang sebagai pekerja yang dibayar peserta didik sehingga otoritas guru atau dosen sebagai pendidik semakin terkikis. Padahal, proses pendidikan itu seharusnya sarat otoritas akademik dan keteladanan hidup dari pendidik.

Ketiga, kurikulum pendidikan berkarakter komersial semakin jauh dari penggalian potensi (talenta) asli dari calon-calon peserta didik karena kurikulum yang disiapkan sekedar diarahkan untuk mengejar kebutuhan pasar. Akibatnya, program studi yang sebenarnya cocok dengan talenta seorang calon peserta didik terpaksa ditutup karena pasar tidak membutuhkannya. Itu jelas akan menghambat pembentukan manusia suthnya (tumbuh sesuai dengan potensi).

Selain itu, bidang studi seni dan sastra serta ilmu-ilmu dasar, seperti fisika dan kimia, sudah mulai jarang dikembangkan di sebagian universitas. Sebab, menurut pengelola pendidikan, bidang-bidang tersebut bukan ladang bisnis yang menjanjikan. Padahal, pengembangan teknologi dan industri di suatu negara tidak mungkin bisa lepas dari pengembangan ilmu-ilmu dasar, seni dan sastra.

Keempat, bidang profesi yang dihasilkan pendidikan berkarakter komersial akan cenderung menjadi profesi yang akan dikomersialkan pula. Jiwa sosial dan jiwa pengabdian dari para penganan profesi itu semakin menghilang di masyarakat. Itu merupakan akibat pergeseran paradigma pendidikan kita dari *study for life* (belajar untuk hidup) menjadi *study for profit oriented*.

Jadi, persoalan mendasar pendidikan kita bukan pada biaya pendidikan yang mahal (karena pendidikan itu memang mahal). Akan tetapi, arah pengelolaan pendidikan yang kian pragmatis dan cenderung sekedar mengikuti tren pasar.

Pengelolaan pendidikan yang berhasil mestinya mampu menerobos kebutuhan pasar. Dengan demikian, idealisme dalam dunia pendidikan mampu memberi sinar atau tuntunan moral terhadap realitas masyarakat.

Hakikat Pendidikan

Untuk menghilangkan jiwa komersial di dalam dunia pendidikan, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat perlu terus mengoptimalkan perannya, baik dalam penentuan arah pengelolaan maupun pembiayaan pendidikan. Bagi lembaga pendidikan yang terus mengejar kualitas, biaya pendidikan memang mahal. Tapi, negara bisa saja membuatnya murah melalui pemberian subsidi atau hibah kepada lembaga pendidikan tersebut.

Konsekuensi-konsekuensi muncul dari hilangnya jiwa komersial pengelolaan pendidikan ini. *Pertama*, pendidik memiliki posisi utama dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Guru dan dosen harus diperlakukan sebagai otoritas akademik yang jiwa pengabdian tidak boleh diganggu dengan urusan-urusan bisnis dalam pendidikan. Misalnya, guru tidak seharusnya disuruh menjual buku atau peralatan belajar di sekolah.

Demikian pula halnya di perguruan tinggi. Dosen bukan profesi yang mengambil keuntungan dari setiap tugas pengabdian, seperti dalam membimbing proyek-proyek tugas akhir mahasiswa. Karena itu, pendidik sebagai pahlawan tanpa jasa harus diposisikan sebagai profesi pengabdian yang kesejahteraannya wajib dijamin negara atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Kedua, program studi dan kurikulum tidak lagi sekadar berorientasi pada tren pasar yang sewaktu-waktu bisa berubah (evolusionis), tetapi berorientasi pada penyediaan pendidikan berdasar potensi peserta didik. Misalnya, meski peminat seni dan sastra tidak banyak, bukan berarti program studi lain, seperti kedokteran dan ekonomi, menjadi bidang studi yang lebih penting.

Setiap program diadakan untuk mengembangkan potensi (talenta) para peserta didik (*vide* pasal 3 UU Sisdiknas), bukan malah memetakan talenta mereka sekadar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, patut disayangkan apabila ada bidang studi atau mata pelajaran yang ditutup pengelola pendidikan hanya karena pasar tidak membutuhkannya. Itu terjadi karena pendidikan gagal dalam menerobos pasar.

Ketiga, kriteria lulusan yang sukses bukan semata-mata diukur dari materi yang akan dihasilkan. Tetapi, aspek yang jauh lebih penting adalah perubahan karakter setiap peserta didik ke arah pemaknaan hidup yang jauh lebih berarti.

Dengan sistem dan karakter pengelolaan pendidikan yang demikian, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD bisa terpakai dengan tepat dan berdaya guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan zaman. (*)